

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING*
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic
Index Tahun 2013-2017)**

Mike Sonita Sari¹, Nayang Helmayunita²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: mikesonitasari@gmail.com

Abstract: *Sharia issuers are determined by considering Islamic principles and it is expected that company activities will be in harmony with Islamic law and framework. ISR is part of corporate social responsibility that should be disclosed by Islamic issuers. However, ISR disclosure is still voluntary, so the level of disclosure of each sharia issuer still varies. This study aims to examine the effect of Good Corporate Governance (GCG) on disclosure of Islamic Social Reporting (ISR). The total samples used in this study is 65 annual reports from 13 companies registered in the Jakarta Islamic Index (JII) for the period 2013-2017. The measurement of ISR disclosure is done by means of content analysis through scoring methods on the annual reports of each sharia issuer. Data analysis was performed with descriptive statistics and classic assumption tests and hypothesis testing with multiple linear regression, F test, R² test, and t test. The results showed that the frequency of board of commissioner meetings had a significant positive effect on ISR disclosure. The size of independent commissioners, the size of the audit committee, and public ownership have a significant negative effect on ISR disclosure. Institutional ownership and managerial ownership have no effect on ISR disclosure.*

Keywords: *Islamic Social Reporting; Good Corporate Governance; Jakarta Islamic Index*

How to cite (APA 6th style)

Sari, M. S. & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), Seri C, 751-7678.

PENDAHULUAN

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini bukan hanya berkembang pada bidang ekonomi konvensional, tetapi juga mulai berkembang di bidang ekonomi yang berbasis syariah. CSR dalam konteks Islam merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Qur'an dan Hadits (Riswanti, 2017).

Pelaporan CSR dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *Islamic Social Reporting* (ISR). Pedoman pengungkapan ISR mengacu pada *Islamic Social Reporting Index* (indeks ISR). Indeks ISR merupakan tolak ukur pengungkapan tanggung jawab sosial entitas Islam yang berdasarkan pada standar-standar pengungkapan CSR yang telah ditetapkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti mengenai item-item CSR apa saja yang seharusnya diungkapkan oleh entitas Islam. Indeks ISR pertama kali diusulkan oleh Ross Haniffa pada tahun 2002. Haniffa (2002) di dalam penelitiannya mengungkapkan, bahwa terdapat keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka kerja konseptual yang didasarkan pada ketentuan syariah. Kerangka kerja konseptual tersebut tidak hanya membantu membuat keputusan untuk umat Islam, namun juga untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT dan masyarakat. Selanjutnya Othman *et al.* (2009) juga mengembangkan lebih luas mengenai indeks pengungkapan yang relevan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

Penelitian mengenai pengungkapan ISR ini menarik untuk diteliti, mengingat beberapa tahun terakhir ini banyak isu kontroversi mengenai pencantuman sertifikasi halal pada produk makanan maupun obat-obatan. Seperti yang dirangkum dalam Liputan6.com tanggal 21 Desember 2018, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa ekspor produk Indonesia ke kawasan Timur Tengah mengalami penurunan karena belum adanya sertifikasi halal terhadap produk-produk tersebut. Pemerintah di negara-negara kawasan Timur Tengah, terutama yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), saat ini mulai memperketat setiap produk yang masuk kenegarannya, salah satunya dengan mewajibkan adanya sertifikasi halal dari produk yang masuk. Dapat dilihat bahwa penerbitan sertifikasi halal pada sebuah produk menjadi perhatian utama saat ini, bukan hanya dalam negeri tetapi juga di luar negeri karena dianggap merupakan bentuk pengungkapan wajib terkait tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholder*, khususnya kepada konsumen. Selain itu, pengungkapan ISR pada saat ini masih bersifat sukarela karena belum ada aturan yang jelas dari pemerintah mengenai pengungkapannya, sehingga tingkat pengungkapan ISR pada setiap perusahaan syariah maupun emiten syariah masih berbeda-beda. Maka sangat diperlukan pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan ISR pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi perusahaan adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). PMK Nomor 88 tahun 2015 menyatakan bahwa GCG adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) lebih menekankan pada pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada semua *stakeholder*. Prinsip transparansi menghendaki penyampaian seluruh informasi, baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (Agoes dan Ardana, 2009:105).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi

independensinya untuk melindungi kepentingan *stakeholders*. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial yang diwajibkan oleh undang-undang. Emiten syariah ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dan diharapkan kegiatan perusahaan akan selaras dengan hukum dan kerangka Islam, salah satunya melalui pengungkapan ISR. Penelitian Muttakin dan Subramaniam (2015) mendukung pengaruh positif antara dewan komisaris independen terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Baidok dan Septiarini (2016), Sulistyawati dan Yuliani (2017) dan Armayanti dan Rahman (2018) menemukan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Selain itu, frekuensi rapat dewan komisaris diduga juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hal ini didukung oleh penelitian Armayanti dan Rahman (2018) yang menemukan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR.

Organ perusahaan selanjutnya yang diduga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR adalah komite audit. Komite audit merupakan organ perusahaan yang bertanggungjawab kepada dewan komisaris serta berfungsi memberikan saran demi tercapainya peningkatan kinerja komisaris. Salah satu alat ukur kinerja komisaris adalah luasnya pengungkapan informasi perusahaan, sehingga komite audit akan mempengaruhi pula pengungkapan ISR oleh perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Indrawaty dan Wardayati (2016), Hasanah *et al.* (2017) dan Armayanti dan Rahman (2018) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Mekanisme *good governance* lain yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan informasi sosial adalah pemilik perusahaan. Pemilik memiliki hak secara langsung untuk mempengaruhi kebijakan dalam perusahaan, termasuk kebijakan tentang tanggung jawab sosial (Dhiyaul-Haq dan Santoso, 2016). Begitupun investor Muslim juga mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keislaman.

Investor institusional memiliki *power* dan *experience* serta bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *good corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan komunikasi secara transparan (Ningrum *et al.*, 2013). Keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan syariah diharapkan akan meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap kinerja manajemen dalam hal peningkatan kuantitas dan kualitas pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan Nugroho dan Yulianto (2015) dan Listyaningsih *et al.* (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningrum *et al.* (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan mendorong manajer untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan ISR, karena pengungkapan ISR akan mempengaruhi citra perusahaan dan akan berdampak pada laba perusahaan. Penelitian Listyaningsih *et al.* (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index*. Sejalan dengan itu Savira (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Kepemilikan publik diduga juga berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. kepemilikan publik adalah kepemilikan saham oleh masyarakat dengan proporsi kepemilikan di bawah 5%. Populasi penduduk Indonesia mayoritas adalah Muslim, sehingga keberadaan investor publik akan mendorong perusahaan dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial yang berdasarkan pada prinsip Islam agar investor tetap menanamkan dananya di perusahaan. Penelitian Rifqiyah (2016) dan Rahayu (2015) yang menguji pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan CSR, memperoleh hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Alasan peneliti menggunakan variabel GCG sebagai variabel yang mempengaruhi ISR adalah karena belum terdapatnya konsistensi hasil di antara penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan publik karena merupakan variabel baru dan sedikit digunakan serta perbedaan pada tahun pengamatan. Alasan selanjutnya karena penelitian-penelitian sebelumnya mayoritas berorientasi pada sektor perbankan syariah, sedangkan untuk sektor non perbankan seperti pasar modal masih minim dilakukan. Mengingat sebagai pelaku ekonomi syariah, emiten syariah juga harus melaporkan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah. Peneliti mencoba mengarahkan tanggung jawab sosial berbasis syariah menggunakan indeks ISR pada emiten syariah yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). JII menggunakan 30 saham syariah paling likuid yang diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari berbagai sektor industri sehingga analisis terhadap objek penelitian lebih akurat dengan waktu yang runtut. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki aktivitas usaha yang kompleks dan masalah keagenan yang timbul juga lebih besar karena lebih sulit untuk diawasi pemilik, sehingga membutuhkan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Selain itu, ukuran perusahaan secara konsisten berpengaruh terhadap pengungkapan ISR (Dhiyaul-Haq dan Santoso, 2016).

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk perkembangan literatur ekonomi Islam dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan terkait isu CSR dan tata kelola perusahaan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan antara *principal* (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat/ investor/pemegang saham) dan *agent* (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat/ manajemen) yang dilandasi dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen and Meckling, 1976 dalam Dhiyaul-Haq dan Santoso, 2016). Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*Conflict of Interest*). Pemilik termotivasi melakukan kontrak dengan agen untuk mensejahterakan dirinya melalui peningkatan profitabilitas/laba perusahaan. Sedangkan agen melakukan kontrak dengan pemilik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya seperti investasi, pinjaman, maupun kontrak investasi (Scott, 2015).

Dalam perspektif keagenan, manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik. Hal ini terjadi karena pemilik tidak dapat mengawasi secara langsung aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan harapan pemilik. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pemilik dan manajemen disebut dengan asimetri informasi.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* secara luas didefinisikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi dan kegiatan perusahaan (Freeman, 1984). Menurut Zsonai (2006) teori *stakeholder* berfokus pada hubungan antara organisasi-organisasi dengan para *stakeholder*-nya. Untuk menjaga hubungan tersebut, harus dilakukan *stakeholder management* dengan cara manajer harus menyusun dan mengimplementasikan proses-proses yang memuaskan semua kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam organisasi. *Stakeholder* perusahaan bukan hanya pemegang saham tetapi lebih luas lagi seperti karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan tersebut.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dimana perusahaan itu berada (Pratiwi dan Chariri, 2013). Menurut Dowling dan Pfeffer (1975:131) legitimasi merupakan hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Legitimasi ini pada tahapan berikutnya akan mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak di inginkan dan meningkatkan reputasi perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat (Rahayu, 2015).

Pengungkapan

Menurut Suwardjono (2005: 134), pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statemen keuangan utama. Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan.

Nuswandari (2009) menyatakan, terdapat dua tipe pengungkapan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal suatu negara. Setiap emiten atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek wajib menyampaikan laporan tahunan secara berkala dan informasi material lainnya kepada Bappepam dan publik. Selanjutnya adalah pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yaitu penyampaian informasi yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib.

Islamic Social Reporting (ISR)

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan suatu standar pelaporan atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ISR merupakan tolak ukur

pengungkapan tanggung jawab sosial entitas Islam yang berdasarkan pada standar-standar pengungkapan CSR yang telah ditetapkan oleh AAOFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti mengenai item-item CSR yang dianggap relevan untuk diungkapkan oleh entitas syariah. Haniffa *et al.* pada tahun 2002 menggunakan lima tema pengungkapan indeks ISR, yaitu tema pendanaan dan investasi, tema produk dan jasa, tema karyawan, tema masyarakat, dan tema lingkungan hidup. Othman *et al.* di tahun 2009, kemudian mengembangkan dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema tata kelola perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG)

PMK Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan, menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

Ukuran Komisaris Independen

Perusahaan wajib memiliki komisaris independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Salah satu syarat tersebut adalah tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis lainnya yang dapat mempengaruhi independensinya untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

Ukuran Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Peraturan ini mengatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki komite audit dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan (POJK Nomor 33/POJK.04/2014, Pasal 31 ayat 1). Rapat diadakan guna membahas dan memastikan bahwa tujuan dan kinerja perusahaan dalam perencanaan strategis, keuangan, akuisisi, divestasi, operasi, manajemen risiko dan tata kelola dapat tercapai sejalan dengan target perusahaan.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusional yang dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki institusi dalam perusahaan. Pemegang saham

institusional biasanya terdiri dari pemerintah, perbankan, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusional lainnya (Nugroho dan Yulianto, 2015). Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar (Rustiarini, 2011).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dari keseluruhan modal saham yang dikelola. Manajemen dalam hal ini adalah dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Savira, 2015).

Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang masing-masing kepemilikannya kurang dari lima persen (5%) (Jannah dan Asrori, 2016). Sementara perusahaan perseroan (PT) yang memiliki saham perusahaan bersangkutan tidak dimasukkan dalam kategori publik. Pertimbangan ini dilakukan karena dapat menjadikan luas pengungkapan laporan keuangan tidak banyak berpengaruh terhadap keputusan manajemen (Rahayu, 2015).

Hubungan Ukuran Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Menurut teori keagenan hubungan antara pemilik dan agen sulit tercipta karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pemegang saham (pemilik) akan mendelegasikan wewenang yang mereka miliki kepada dewan komisaris untuk mengawasi aktivitas manajemen di dalam perusahaan. Keanggotaan dewan komisaris salah satunya terdiri dari komisaris independen. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang yang berlaku, termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Sehingga keberadaan komisaris independen akan memberikan tekanan dan dorongan kepada pihak manajemen dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Teori *stakeholder* menjelaskan, untuk menjaga keberhasilan perusahaan maka manajemen harus dapat mengimplementasikan proses-proses yang memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sejalan dengan teori legitimasi menjelaskan keberlangsungan perusahaan sangat tergantung pada legitimasi dari masyarakat tempat perusahaan tersebut berada, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga keberlangsungan perusahaan tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan masyarakat Muslim yang merupakan pemegang saham sekaligus konsumen utama perusahaan. Oleh sebab itu, komisaris independen sebagai perwakilan publik/*stakeholder* dalam sebuah perusahaan akan memberikan perhatian lebih terkait dengan pengungkapan ISR. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka komisaris independen dapat mengambil keputusan dengan lebih objektif untuk melindungi hak para *stakeholder*, yaitu dengan pengungkapan ISR yang lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hubungan Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan teori keagenan, para pemilik akan berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dan memastikan terciptanya tanggung jawab agen terhadap kepemilikan perusahaan. Pemilik akan mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha manajemen berdasarkan informasi yang diperolehnya (Hasanah *et al.*, 2017). Komite audit yang bertanggungjawab membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan manajemen risiko, bertanggungjawab atas laporan keuangan dan laporan tahunan, menjalankan tata kelola perusahaan, dan hal-hal lain yang menjadi perhatian dewan komisaris diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pemilik. Keberadaan komite audit akan mengurangi konflik kepentingan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik (pemegang saham).

Emiten syariah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan diharapkan kegiatan perusahaan akan selaras dengan hukum dan kerangka Islam, sehingga ISR juga seharusnya diungkapkan di dalam laporan tahunan emiten syariah. Kontrol yang efektif dari komite audit diharapkan akan meningkatkan sistem pengendalian internal dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit dalam perusahaan akan semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen sehingga akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR di dalam laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hubungan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Menurut teori keagenan, dewan komisaris dipercayakan untuk melindungi hak para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Sehingga dewan komisaris harus bertindak sesuai keinginan dan kebutuhan *stakeholder*. Salah satu kebutuhan *stakeholder* adalah adanya pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pemenuhan atas tuntutan masyarakat dan apa yang diharuskan oleh peraturan. Bagi emiten syariah pelaksanaan tanggung jawab sosial tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam memenuhi tanggung jawab terhadap tugasnya, dewan komisaris melakukan rapat beberapa kali dalam satu periode.

Dewan komisaris mengadakan rapat guna membahas persoalan yang berhubungan dengan manajemen perusahaan, mengevaluasi kinerja perusahaan, laporan audit yang dilaksanakan oleh komite audit dan memastikan bahwa manajemen risiko dan tata kelola dapat tercapai sejalan dengan target perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan sering dilakukan evaluasi atas kinerja tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dewan komisaris semakin sering pula memberikan opininya terkait dengan pengungkapan ISR, karena ISR merupakan salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*-nya, terutama kepada *stakeholder* Muslim. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan teori keagenan pemisahan kepemilikan dan pengendalian suatu perusahaan dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi dan konflik keagenan (antara *agent* dan *principal*)

sehingga dapat memicu *agency cost* (biaya keagenan). Penyebab dari adanya biaya keagenan salah satunya adalah adanya kepemilikan saham perusahaan oleh publik, dalam hal ini adalah investor institusional. Hal tersebut terjadi karena keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan terjadinya *agency problem* (masalah keagenan) antara manajer dan pemegang saham. Menurut Oh *et al.* (2011), dengan sumber daya dan informasi yang mereka miliki, investor institusional dapat melakukan pengawasan yang efektif dan cenderung terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan terutama yang bersifat strategis dibandingkan dengan investor lain.

Menurut Graves dan Waddock (1994), investor institusi yang cenderung menghindari risiko akan menampilkan sikap yang menguntungkan terhadap penyertaan modal pada perusahaan dengan cara terlibat dalam kegiatan CSR karena keyakinan mereka bahwa kinerja CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan mengurangi risiko. Begitu pula pada emiten syariah yang seharusnya mengungkapkan tanggung jawab sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga keberadaan kepemilikan institusional diharapkan akan meningkatkan pengungkapan ISR. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan pespektif teori keagenan, apabila porsi kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan semakin besar maka akan menyebabkan konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dan pemilik semakin kecil. Hal tersebut dipertegas oleh McConnell dan Servaes (1990); Denis *et al.* (1997) dalam Oh *et al.* (2011) bahwa jika manajer memiliki ekuitas di dalam perusahaan, maka mereka lebih cenderung membuat keputusan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Menurut teori legitimasi, pengungkapan ISR merupakan salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kegiatan operasional perusahaan sehingga akan meningkatkan citra perusahaan. Semakin bagus citra perusahaan di mata *stakeholders*, maka harapannya semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, dan return yang diperoleh pemegang saham selaku manajemen akan semakin besar. Sehingga semakin besar proporsi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka diharapkan akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Hubungan Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha memenuhi segala kebutuhan para stakeholder. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi akan lebih memperhatikan pengungkapan sosial karena masyarakat akan memperhatikan apakah perusahaan tempatnya berinvestasi melakukan tindakan sosial yang dapat mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan atau tidak. Sehingga perusahaan akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholder* tersebut melalui informasi pengungkapan kegiatan sosial perusahaan.

Sebagaimana penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, diduga kepemilikan saham publik perusahaan di Indonesia juga mayoritas dimiliki oleh investor Muslim. Investor Muslim, tentu sangat mengharapkan jika aktivitas-aktivitas perusahaan tempatnya berinvestasi tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah, sehingga informasi mengenai ISR sangat dibutuhkan. Penelitian Rizkiningsih (2012) membuktikan bahwa jumlah populasi muslim di suatu negara memiliki pengaruh positif terhadap ISR. Keberadaan investor Muslim akan memberikan dorongan terhadap perusahaan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sehingga semakin besar komposisi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki publik diharapkan akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lebih banyak terkait ISR karena dinilai memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆: Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*

METODE PENELITIAN

Sampel dan Jenis Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menunjukkan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama 2013-2017. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan (*judgment sampling*). Kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah (1) perusahaan yang melaporkan laporan tahunan perusahaannya di *website* perusahaan selama tahun 2013-2017; (2) perusahaan yang tidak pernah *delisting* dari *Jakarta Islamic Index* selama periode pengamatan; dan (3) perusahaan yang menggunakan mata uang pelaporan Rupiah.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan tahunan perusahaan publik yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) yang dapat diperoleh melalui *website* masing-masing perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 laporan tahunan dari 13 perusahaan.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dependen adalah pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Pengungkapan ISR diukur dengan indeks ISR yang mengacu pada penelitian Dhiyaul-Haq dan Santoso (2016) yang merupakan pengembangan dari yang dilakukan oleh Haniffa (2002) dan Othman *et al.* (2009). Indeks ISR terdiri dari 6 tema yaitu tema keuangan, produk dan jasa, sumber daya manusia, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Tema tersebut terdiri dari 51 *item* pernyataan.

Peneliti melakukan analisis secara keseluruhan (*content analysis*) terhadap laporan tahunan masing-masing emiten syariah. Analisis ini dengan metode *skoring* yaitu Jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pernyataan maka diberi nilai 0 dan bila mengungkapkan diberi nilai 1. Kemudian ISR dihitung dengan formula sebagai berikut.

$$ISR D_j = \frac{\sum X_{ij}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

$ISR D_j$ = *Islamic Social Reporting Disclosure*

$\sum X_{ij}$ = Jumlah *item* yang diungkapkan perusahaan

n = Jumlah seluruh *item* pengungkapan ISR

Variabel Independen pertama yaitu ukuran komisaris independen diukur berdasarkan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan. Komite Audit diukur berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat dalam perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris diukur berdasarkan berapa kali dewan komisaris mengadakan rapat internal maupun rapat gabungan dalam satu tahun buku.

Cara pengukuran struktur kepemilikan adalah berdasarkan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh Institusi, Manajer, maupun Publik dalam perusahaan. Kepemilikan institusional disimbolkan dengan IO (*Institutional Ownership*), kepemilikan manajerial disimbolkan dengan MO (*Managerial Ownership*), dan kepemilikan publik disimbolkan dengan PO (*Public Ownership*). Sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dilambangkan dengan *Size* dan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) total aset.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan *content analysis*, analisis deskriptif, dan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis melalui metode regresi linear berganda, uji F, uji *Adjusted R²*, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) variabel dependen yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR) sebesar 0,5943 dengan standar deviasi sebesar 0,0556. Nilai minimum variabel ISR sebesar 45,10% dan nilai maksimum sebesar 72,55%. Variabel independen ukuran komisaris independen (UKI) memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,4347 dan standar deviasi sebesar 0,1550. Nilai minimum variabel UKI sebesar 28,6% dan nilai maksimum 83,3%.

Variabel independen ukuran komite audit (UKA) memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,4300 dan standar deviasi sebesar 1,000. Nilai minimum variabel UKA sebesar 2 dan nilai maksimum 7. Variabel independen frekuensi rapat dewan komisaris (FRDK) memperoleh nilai rata-rata sebesar 12,1400 dan standar deviasi sebesar 8,3480. Nilai minimum variabel FRDK sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 34. Variabel independen kepemilikan institusional (IO) memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,7162 dan standar deviasi sebesar 0,2142. Nilai minimum variabel IO sebesar 18,12% dan nilai maksimum sebesar 99,6%.

Variabel independen kepemilikan manajerial (MO) memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,0006 dan standar deviasi sebesar 0,0017. Nilai minimum variabel MO sebesar 0,0000 dan nilai maksimum sebesar 0,0073. Variabel independen kepemilikan publik (PO) memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,4060 dan standar deviasi sebesar 0,1364. Nilai minimum variabel PO sebesar 15% dan nilai maksimum sebesar 81,88%. Variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) memperoleh nilai rata-rata sebesar 10,5639 dan standar deviasi sebesar 0,4245. Nilai minimum variabel *size* sebesar 9,91 dan nilai maksimum sebesar 11,47. Angka-angka tersebut tertulis dalam bentuk

logaritma natural dari total aset perusahaan. Nilai rata-rata masing-masing variabel lebih besar dari standar deviasi menunjukkan bahwa kualitas data untuk semua variabel cukup baik atau penyebarannya merata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas memperoleh nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,375. Uji multikolinieritas memperoleh nilai *tolerance* kurang dari 0,1 ($> 0,100$) dan $VIF < 10$. Uji autokorelasi diketahui nilai *Durbin-Watson* (DW hitung) sebesar 1,051. Berdasarkan Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan gambar *scatterplot*, titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas atau tidak membentuk pola tertentu dan teratur di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil SPSS tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah asumsi klasik pada penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian regresi dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hubungan antara ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada lampiran.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada lampiran, maka dapat dianalisis model persamaan regresi liner berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,388 - 0,070UKI - 0,023UKA + 0,002FRDK + 0,019IO - 0,409MO - 0,157PO + 0,106Size + e$$

Uji Statistik F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,718 lebih besar dari 4 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak pada derajat kepercayaan 0,05. Selain itu nilai F_{hitung} juga lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} 11,718 > F_{tabel} 2,16$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti bahwa variabel ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan secara serentak (simultan) dan signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Berdasarkan hasil *adjusted R²* diketahui nilai *adjusted R²* adalah 0,540. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi variabel independen dan variabel kontrol adalah sebesar 54,00%, sedangkan 46,00% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian.

Uji Statistik t dan Pembahasan

Hasil uji nilai koefisien (β_1) variabel ukuran komisaris independen adalah bertanda negatif yaitu -0,070 dan nilai signifikan 0,046 lebih kecil dari 0,05 ($0,046 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan ukuran komisaris independen (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan demikian hipotesis satu (H_1) **ditolak**. Pengaruh negatif ini dapat disebabkan dari fungsi dan tanggung jawab keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan. Berdasarkan pada tugas dan tanggung

jawab komisaris independen yang dipaparkan di dalam laporan tahunan perusahaan, diketahui bahwa komisaris independen yang terdapat pada sebagian besar perusahaan observasian tidak memiliki tugas yang berhubungan dengan laporan tahunan maupun dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris independen belum mampu memberikan rekomendasi agar manajemen menjalankan aktivitas sesuai dengan apa yang diinginkan para *stakeholder*, yaitu terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Charles dan Chariri (2012) dan Qoyum *et al.* (2017) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan ISR.

Hasil uji nilai koefisien (β_2) variabel ukuran komite audit adalah bertanda negatif yaitu -0,023 dan nilai signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan ukuran komite audit (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan demikian hipotesis dua (H_2) **ditolak**. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR. Pertama, berdasarkan informasi yang diperoleh dari piagam komite audit masing-masing perusahaan, diketahui bahwa komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam hal kewajaran laporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal, serta mendorong dan mengarahkan perseroan agar dikelola dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada piagam-piagam tersebut hanya terdapat dua perusahaan yang menjelaskan bahwa komite audit memiliki tugas mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap proses tata kelola CSR. Ini mengindikasikan bahwa tujuan dibentuknya komite audit pada sebagian besar perusahaan observasi tidak terlalu difokuskan pada pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kedua, karena pengungkapan ISR saat ini masih bersifat sukarela, sehingga komite audit sebagai pemberi saran terkait pengelolaan keuangan perusahaan tentu akan mempertimbangkan biaya serta manfaat jika perusahaan melaksanakan ISR. Ketiga, ukuran komite audit yang rata-rata hanya 3 anggota dalam suatu perusahaan, mengindikasikan bahwa pembentukan komite audit dimungkinkan hanya sebatas pemenuhan regulasi semata, sehingga dengan jumlah yang sedikit kemungkinan komite audit tidak dapat menjalankan perannya secara efektif. Selain itu, juga menyebabkan koordinasi antara komite audit dengan manajemen terkait kebijakan ISR belum berjalan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Charles dan Chariri (2012) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ISR pada bank syariah di Asia.

Hasil uji nilai koefisien (β_3) variabel frekuensi rapat dewan komisaris adalah bertanda positif yaitu 0,002 dan nilai signifikan 0,027 lebih kecil dari 0,05 ($0,027 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan frekuensi rapat dewan komisaris (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan demikian hipotesis tiga (H_3) **diterima**. Hal ini membuktikan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka tingkat pengungkapan ISR oleh perusahaan juga semakin luas. Hasil penelitian mengindikasikan semakin sering pertemuan yang dilakukan dewan komisaris maka semakin banyak waktu untuk membahas pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Evaluasi atas kebijakan-kebijakan perusahaan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang berbasis syariah juga akan sering dilakukan, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan pengungkapan ISR yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

penelitian Armayanti dan Rahman (2018) yang menemukan bahwa frekuensi rapat komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan ISR pada bank umum syariah yang ada di Indonesia periode 2012-2016.

Hasil uji nilai koefisien (β_4) variabel kepemilikan institusional adalah bertanda positif yaitu 0,019 dan nilai signifikan 0,683 lebih besar dari 0,05 ($0,683 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan ukuran kepemilikan institusional (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan demikian hipotesis empat (H_4) **ditolak**. Berdasarkan informasi kepemilikan institusional di laporan tahunan perusahaan observasian, diketahui bahwa rata-rata pemegang saham institusional terbesar di dalam perusahaan adalah institusi-institusi yang tidak berbasis syariah. Sehingga diduga mereka tidak begitu mempertimbangkan pengungkapan ISR dalam keputusan investasinya. Investor institusional sepertinya lebih mempertimbangkan aspek keuangan atau kinerja keuangan perusahaan dalam keputusan investasinya. Namun, penelitian ini menghadapi keterbatasan untuk memperoleh data terkait peran kepemilikan institusional dalam tata kelola perusahaan. Kepemilikan institusional yang diungkap dalam laporan tahunan tidak menjelaskan tentang tujuan kepemilikan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Savira (2015) dan Dhiyaul-Haq dan Santoso (2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Hasil uji nilai koefisien (β_5) variabel kepemilikan manajerial adalah bertanda negatif yaitu -0,409 dan nilai signifikan 0,892 lebih besar dari 0,05 ($0,892 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan kepemilikan manajerial (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan demikian hipotesis lima (H_5) **ditolak**. Hal ini disebabkan karena tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII periode 2013-2017 sangat rendah yang rata-rata hanya 0,06%. Selain itu, kepemilikan manajerial lebih berfokus untuk meningkatkan kinerja keuangan atau peningkatan laba perusahaan karena lebih menguntungkan mereka secara langsung dan jangka pendek melalui *return* yang akan diperoleh, dibandingkan melakukan pengungkapan ISR yang bersifat jangka panjang dan mengeluarkan cukup biaya.

Hasil uji nilai koefisien (β_6) variabel kepemilikan publik adalah bertanda negatif yaitu -0,157 dan nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan kepemilikan publik (X_6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dengan demikian hipotesis enam (H_6) **ditolak**. Hal tersebut terjadi dimungkinkan karena kesadaran publik yang masih kurang terhadap pengungkapan ISR. Publik sebagai investor cenderung mementingkan peningkatan harga saham karena ingin memperoleh *return* yang selalu meningkat dari investasi yang mereka lakukan, sehingga ISR tidak menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Pengaruh negatif antara kepemilikan publik terhadap pengungkapan ISR juga dapat dimungkinkan karena kepemilikan publik memiliki proporsi yang relatif kecil dan tersebar ke berbagai investor yaitu di bawah 5%, sehingga tidak begitu mempengaruhi kebijakan perusahaan termasuk dalam pengungkapan informasi ISR.

Hasil uji nilai koefisien (β_7) variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) adalah bertanda positif yaitu 0,106 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), sehingga bisa dijadikan variabel kontrol.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara simultan variabel ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index (JII)* selama tahun 2013-2017. Secara parsial ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, dan kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai *adjusted R²* adalah 0,540 yang berarti bahwa kontribusi variabel independen dan variabel kontrol hanya sebesar 54%, sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR.
2. Struktur *Good Corporate Governance (GCG)* dalam penelitian ini hanya diprosikan ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, dan struktur kepemilikan. Penggunaan variabel-variabel ini belum cukup mencerminkan *corporate governance* perusahaan secara keseluruhan.
3. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu hanya 13 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian.
4. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian hanya berasal dari laporan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item dalam daftar pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan indeks ISR diungkapkan secara jelas.
5. Masih adanya unsur subjektif dalam menentukan indeks pengungkapan karena belum adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan standar atau acuan, sehingga jumlah indikator indeks ISR yang digunakan dapat berbeda antar peneliti.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang diidentifikasi dapat mempengaruhi pengungkapan ISR karena nilai *adjusted R²* yang dihasilkan baru 54%. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel moderasi untuk memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan proksi lain untuk mengukur komisaris independen dan komite audit misalnya berdasarkan gender, kompetensi, agama dan lainnya. Sedangkan untuk struktur kepemilikan dapat menambahkan proksi kepemilikan mayoritas.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel penelitian sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat. Peneliti dapat menggunakan objek penelitian yaitu semua perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) agar jumlah sampel yang digunakan lebih banyak.

4. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sumber yang lebih banyak seperti penggunaan laporan keberlanjutan perusahaan agar informasi yang diperoleh lebih jelas dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2010). Exposure Draft on Governance Standards for Islamic Financial Institutions No.7. www.aaofii.com. diakses tanggal 20 November 2018.
- Agoes, S. dan Ardana, C.I. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Armayanti, Y. dan Rahman, A. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Proceeding*, Seminar Nasional Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Baidok, W., Septiarini, D. F. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan*, 3(12), 1010-2034.
- Charles dan Chariri. (2012). Analisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-15.
- Dhiyaul-Haq, Z. M., Santoso, A. L. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Penghargaan, dan Tipe Kepemilikan Bank Umum Syariah Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung.
- Dowling dan Pfeffer. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122-136.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: a Stakeholder Approach*. Pitman, Boston, MA.
- Graves, S.B. and S. A. Waddock. (1994). Institutional owners and corporate social performance. *Academy of Management Journal*, 37(4) 1034-1046.
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128-146.
- Hasanah, T.N., Widiyanti, W.N., Sudarno. (2017). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 115-120.
- Indrawaty, Wardayati, S. M. (2016). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Social and Behavior Sciences*, 219(2016), 338-343.
- Jannah, M.A., Asrori. (2016). Pengaruh GCG, *Size*, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan ISR. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1-9.
- Listyaningsih, E., Dewi, R., Baiti, N. (2018). The Effect of Good Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure on Jakarta Islamic Index. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 4(3), 273-281.
- Muttakin, M. B., & N. Subramaniam. (2015). Firm ownership and board characteristics: Do they matter for corporate social responsibility disclosure of Indian companies?. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 138 – 165.
- Ningrum, A.R., Fachrurrozi, Jayanto, Y.P. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan ISR. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 430-438.

- Nugroho, N.M., Yulianto, A. (2015). Pengaruh Profitabilitas dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar JII 2011-2013. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1-12.
- Nuswandari, Cahyani. (2009). Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif *Signaling Theory*. *Kajian Akuntansi*, 1(1), 48-57.
- Oh, W.Y., Chang, Y.K. and Martynov, A. 2011. The effect of ownership structure on corporate social responsibility: empirical evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(2), 283-297.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Sharia-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12, 4-20.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Pratiwi, P. K., dan Chariri, A. (2013). *Environmental Incidents*, Pemberitaan Media Dan Praktik Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Disclosures*): Studi Pada Sustainability Report Asia Pulp And Paper Co.,Ltd. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(3), 1-12.
- Qoyum, A., Mutmainah, L., Setyono, J., Qizam, I. (2017). The Impact of Good Corporate Governance, Company Size on Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 130-159.
- Rahayu, Puji. (2015). Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas Dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan *Property Dan RealEstate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Rifqiyah, Rina, Fatkhiyatur. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Riswanti. (2017). Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility*, Kinerja Lingkungan terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rizkiningsih, Priyesta. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR): Suti Empiris pada Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Negara-negara *Gulf Cooperation Council*. *Skripsi*. Universitas Indonesia.
- Rustiarini, N.W. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1-24.
- Savira, M. N. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, *Cross-Directorship*, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory. Seventh Edition*. USA: Prentice Hall, Inc.

- Septian, D. (2018). Tak Bersertifikat Halal, Produk RI Kerap Tertahan Saat Masuk Ke Timur Tengah. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3854305/>. Diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Sulistyawati, I.A. dan Yuliani, I. (2017). Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Indeks Saham Syariah Indonesia. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 13(2), 15-27.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Trisnawati, R. (2014). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Industri Perbankan di Indonesia. *Seminar Nasional dan Call For Paper Program Studi Akuntansi –FEB UMS*. 367-386.
- Zsonai, L. (2006). Extended Stakeholder Theory. *Society and Business Review*, 1(1), 37-44.